BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Negara dapat maju dan berkembang jika ditopang dengan adanya masyarakat yang sehat. Kesehatan masyarakat tersebut akan tecapai dengan adanya Sistem Kesehatan Nasional (SKN). SKN merupakan pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (Presiden RI, 2012).

Upaya yang dilakukan Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah masyarakat mendapatkan ketersediaan dalam hal kesehatan yang merata, bermutu dan berkeadilan. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah instansi pemerintah pada tingkat provinsi yang memiliki tanggung jawab dalam bidang kesehatan yang secara struktural bertanggung jawab pada gubernur dan secara fungsional memiliki koordinasi dan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu penyelenggara pembangunan dalam bidang kesehatan mempunyai visi yaitu “Masyarakat Jawa Timur Mandiri untuk Hidup Sehat”. Arti dari visi tersebut adalah suatu kondisi dimana masyarakat Jawa Timur

menyadari, mau, dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat. Pemenuhan visi tersebut didukung dengan adanya misi yang dimiliki Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yaitu antara lain mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau. Komponen yang berperan besar dalam mewujudkan misi tersebut adalah sumber daya manusia yang kompeten. Salah satu sumber daya manusia yang kompeten adalah apoteker.

Apoteker memiliki peran dalam Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Seksi Kefarmasian, serta Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap pimpinan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) memiliki tugas dalam pelaksanaan perumusan dan kebijakan operasional pada bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan.

Peran apoteker sangat berpengaruh sebagai salah satu tenaga kesehatan yang berkompeten dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Apoteker harus mengupayakan ketersediaan, distribusi, keamanan, mutu, efektivitas, keterjangkauan obat, vaksin dan alat kesehatan sehingga tercapai pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau. Apoteker harus memiliki

pengetahuan dan keterampilan dalam hal pengawasan, pembinaan dan pengendalian perbekalan farmasi yang merupakan standar pelayanan kefarmasian. Oleh karena itu, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di bidang pemerintahan. PKPA di bidang pemerintahan diselenggarakan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 2 Juli – 5 Juli 2018.

1.2 Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang tugas pokok dan fungsi Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam lembaga pemerintahan.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di lembaga pemerintahan.
3. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

1.3 Manfaat

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di lembaga pemerintahan.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di lembaga pemerintahan.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.